



JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JMPIS)

E-ISSN : 2716-375X
P-ISSN : 2716-3768

<https://dinastirev.org/JMPIS>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i3>

Received: 7 Mei 2024, Revised: 16 Mei 2024, Publish: 17 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Ragam Inisiatif Reformasi Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan di Wilayah Perbatasan: Refleksi dari Kabupaten Mahakam Ulu

Florianus Alui¹, Reza Fathurrahman²

¹ Faculty of Administrative Science, University of Indonesia, florianusalui76@gmail.com

² Faculty of Administrative Science, University of Indonesia, rezafathurrahman@ui.ac.id

Corresponding Author: florianusalui76@gmail.com

Abstract: *As a border region, Mahakam Ulu Regency has homework to improve the quality and equality of education in the area. Moreover, current conditions show that the Human Development Index in Mahakam Ulu Regency is still low. With its status as a border area, the Mahakam Ulu Regency Government has a big responsibility to improve the quality and equality of education in the area, especially in the era of regional autonomy. This article aims to analyze various reform initiatives in the education sector carried out by the Mahakam Ulu Regency Government in improving the quality and equality of education as one of the border regions. This article uses a qualitative approach with the process of collecting and analyzing literature and document study data. The results of the analysis show that infrastructure development and providing educational scholarships to increase human resource capacity are the most prominent initiatives among the various strategic programs carried out by the Mahakam Ulu Regency Government as an effort to reform education in the region.*

Keyword: *Education Reform, Border Areas, Quality of Education, Equality of Education.*

Abstrak: Sebagai wilayah perbatasan, Kabupaten Mahakam Ulu memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di daerahnya. Apalagi, kondisi terkini menunjukkan masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu. Dengan statusnya sebagai daerah perbatasan, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu memiliki tanggung jawab yang besar untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di daerahnya, terlebih di era otonomi daerah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis berbagai inisiatif reformasi di bidang pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan sebagai salah satu wilayah perbatasan. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan proses pengumpulan dan analisis data studi literatur dan dokumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dan pemberian beasiswa pendidikan untuk peningkatan kapasitas SDM menjadi inisiatif yang paling menonjol di antara berbagai program strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu sebagai upaya reformasi pendidikan di daerahnya.

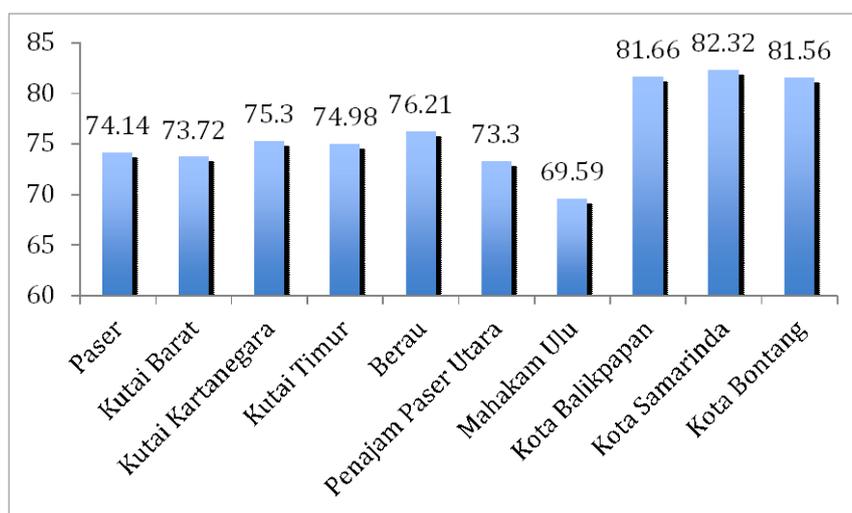
Kata Kunci: Reformasi Pendidikan, Wilayah Perbatasan, Kualitas Pendidikan, Pemerataan Pendidikan.

PENDAHULUAN

Reformasi pendidikan Indonesia ditujukan untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan (Sukmayadi & Yahya, 2020; Fadhil & Sabic-El-Rayess, 2021). Hal ini merupakan salah satu tuntutan masyarakat terhadap pelayanan di bidang pendidikan. Semua orang sepakat bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dengan kondisi geografis dan kondisi pendapatan daerah serta penduduk yang beragam (Jaelani, Handayani, & Karjoko, 2020). Hal ini berimplikasi pada beragamnya capaian pembangunan termasuk pembangunan pendidikan. Perbedaan-perbedaan tersebut harus segera difasilitasi dalam rangka peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.

Dengan wilayah yang begitu luas, Indonesia memiliki tantangan dalam membangun kapasitas sumber daya manusianya sehingga merata dan berkualitas (Prasetyo dkk., 2020). Hal itu karena terdapat wilayah yang tertinggal dibandingkan daerah lainnya terkait kapasitas sumber daya manusia ini. Salah satu wilayah yang tertinggal tersebut dan seringkali menjadi sorotan adalah wilayah perbatasan.

Kapasitas sumber daya manusia di wilayah perbatasan tergolong lebih rendah dibandingkan dengan daerah lainnya (Siswanto dkk., 2022; Putri, 2019; Rahim dkk., 2023). Di salah satu wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, yaitu Kabupaten Mahakam Ulu, menunjukkan hal tersebut bahwa kapasitas sumber daya manusia yang ada di kabupaten tersebut tergolong masih tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2023 tercatat masih di angka 69,59 (Badan Pusat Statistik, 2024). Angka tersebut merupakan yang terendah diantara kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur (lihat Gambar 1). Angka IPM yang dimiliki oleh Kabupaten Mahakam Ulu tersebut juga menunjukkan angka IPM di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Timur (78,2) dan di bawah rata-rata angka IPM secara nasional (73,55).



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 1. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Gambaran di atas menunjukkan masih perlu perhatian yang begitu besar terhadap wilayah perbatasan, terutama Kabupaten Mahakam Ulu, dalam konteks pembangunan kapasitas sumber daya manusia. Hal itu tentu penting dilakukan mengingat daerah perbatasan merupakan wajah depan Indonesia (Elyta & Kartikasari, 2021). Kawasan perbatasan antar

negara mempunyai posisi strategis sebagai pusat pertumbuhan regional untuk memajukan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di daerah tertinggal melalui perdagangan lintas batas. Hal ini akan memberikan peluang peningkatan kegiatan produksi sehingga menghasilkan berbagai *multiplier effect* (Putri, Hernovianty, & Yuniarti, 2020). Kawasan perbatasan dapat memberikan *multiplier effect* karena mempunyai potensi strategis untuk mengembangkan kegiatan perdagangan internasional dan berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah khususnya di bidang perdagangan, pariwisata, dan pengembangan industri (Mederios, 2015).

Dengan urgensi yang dimiliki oleh wilayah perbatasan, maka penting bagi pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk meningkatkan pilar-pilar dari IPM di atas. Salah satu yang krusial untuk diberikan perhatian adalah pilar pendidikan. Pelayanan di bidang pendidikan menjadi indikator penentu pembangunan masyarakat dan perekonomian di daerah perbatasan, dan pendidikan dapat menjadi investasi bagi suatu daerah untuk berkembang ke arah yang lebih baik (Uhaib dkk., 2022; Putri & Sulistya, 2019). Hal ini didasari dengan banyaknya masyarakat yang mengenyam pendidikan akan mengurangi angka buta huruf pada kelompok masyarakat dan menjadi masyarakat terpelajar yang dapat menjadi modal dalam meningkatkan keterampilan dalam kegiatan mendukung pembangunan daerah dan perekonomian.

Dalam konteks nasional, potret yang terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu sebagai daerah perbatasan memberikan dinamika tersendiri bagi pencapaian Indonesia Emas pada tahun 2045. Meskipun kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari berbagai aspek, namun aspek pendidikan yang menjadi tolak ukur tersendiri bagi kemajuan negara Pendidikan bukan sekedar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, namun suatu keharusan yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Dengan potret aspek pendidikan yang notabene masih kurang baik di Kabupaten Mahakam Ulu sebagai daerah perbatasan, menjadi fokus penting pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat disana.

Dengan konsep desentralisasi yang diterapkan, maka mengandung makna bahwa Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu memiliki tanggung jawab lebih untuk memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan kreativitas dan inovasi dari Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu sehingga mampu mendongkrak pencapaian pembangunan di bidang pendidikan. Dalam konteks ini, reformasi pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu memiliki relevansinya.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis berbagai inisiatif reformasi di bidang pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam rangka meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan sebagai salah satu wilayah perbatasan.

METODE

Artikel ini ditulis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data yang dikumpulkan dan diolah untuk menunjang penulisan artikel ini berasal dari berbagai sumber sekunder. Data-data yang dikumpulkan dan dianalisis ditujukan untuk dideskripsikan dalam rangka menjawab tujuan penulisan artikel. Berbagai data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas menjadi kunci penting pembangunan Mahakam Ulu di masa mendatang. Inilah yang mendorong Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu fokus membangun SDM berkualitas, sekaligus sebagai bagian dari pembangunan manusia. Strategi yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan dasar seperti pendidikan. Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan menjadi salah satu dari

10 (sepuluh) program aksi Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu periode 2021-2026: “Penataan dan peningkatan pelayanan Pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan”.

Dari hulu sampai ke hilir, secara holistik, Pemerintah Kabupaten Mahakam Hulu berupaya memberikan dukungan untuk sektor pendidikan termasuk antara lain dukungan terhadap SDM guru terampil dengan tidak mengesampingkan dukungan penyiapan infrastruktur yang memadai. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu memberikan program sertifikasi serta peningkatan kapasitas dan pendidikan guru secara gratis. Keberpihakan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu pada sektor pendidikan bisa dilihat dari program-program strategis yang terus ditingkatkan setiap tahunnya, diantaranya:

1. Peningkatan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Sektor Pendidikan, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), dan Insentif Guru,
2. Standarisasi Pelayanan Pendidikan di Sekolah Negeri,
3. Peningkatan Paket Bantuan Kepada Pelajar Negeri dan Swasta,
4. Meningkatkan Jumlah Peserta Penerima Beasiswa Per Tahun,
5. Peningkatan Kapasitas Guru dengan fasilitasi Sertifikasi dan Pendidikan Gratis,
6. Meningkatkan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
7. Insentif untuk Guru Swasta, Guru Sekolah Minggu, Guru Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ/TPA), Guru Ngaji, Takmir Masjid, Pastor dan Pendeta, dan
8. Memperioritaskan Tenaga Non PNS (TNP) untuk mengikuti seleksi menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan PNS.

Perhatian dalam pembangunan fisik bidang pendidikan atau infrastruktur pendidikan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu tidak saja berupa gedung sekolah, tetapi juga meliputi sarana dan prasarana pembelajaran (bangku, meja, papan tulis, dsb), perumahan guru/rumah dinas, sarana aksesibilitas seperti jalan menuju sekolah, utilitas pendukung seperti Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK), taman, dan sarana pendukung lainnya. Saat ini gedung sekolah di wilayah Mahakam Ulu lebih merata bila dibandingkan dengan kondisi 10 tahun lalu setelah dimekarkan. Saat ini, terdapat sekitar 125 institusi pendidikan di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, dan tingkat SMA/SMK. Jumlah ini mengalami perkembangan pesat hampir setiap tahun. Prasarana lainnya yang terus ditingkatkan pemerintah adalah pendukung sektor pendidikan seperti akses internet dan kebutuhan untuk proses belajar mengajar lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan sektor pendidikan di Kabupaten Mahakam Ulu.

Saat ini, hampir seluruh desa/kampung di Kabupaten Mahakam Ulu memiliki sekolah pendidikan usia dini (PAUD/KB/TK). Terdapat 71 unit PAUD/KB/TK yang mayoritas sekolahnya merupakan milik swasta atau perusahaan. Bangunan Sekolah Dasar (SD) juga sudah ada hampir di seluruh desa/kampung di Kabupaten Mahakam Ulu. Total, terdapat 38 unit bangunan SD yang 37 unit merupakan milik Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dan 1 unit milik swasta. Untuk jenjang SMP, masing-masing kecamatan juga sudah dilengkapi dua unit sampai lima unit gedung SMP. Secara total, terdapat 18 unit bangunan SMP yang 15 unit bangunan SMP merupakan milik Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dan 3 unit milik swasta. Adapun untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) sudah berdiri di masing-masing kecamatan yang secara total untuk tingkat kabupaten terdapat 7 unit SMA dan 2 unit SMK. Meskipun sebetulnya untuk jenjang SMA dan SMK menjadi wewenang pemerintah provinsi.

Selain hal di atas, akselerasi pembangunan infrastruktur dasar pendidikan terus dilakukan. Pada bidang pendidikan misalnya, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menjadikan SD 007 Mamahak Besar yang berada di Kecamatan Long Bagun, sebagai *blue print* atau percontohan bagi pembangunan fasilitas pendidikan di Mahakam Ulu. Untuk diketahui, SD 007 Mamahak Besar dibangun dengan kualitas Standar Nasional dan sudah mendapat Akreditasi B dan direncanakan bisa mendapatkan Akreditasi A. Sekolah dengan kapasitas sekitar 180 pelajar ini memiliki berbagai fasilitas dan keunggulan yang bisa diadopsi untuk pembangunan dan revitalisasi sarana pendidikan di Kabupaten Mahakam Ulu.

Kemudian, dalam rangka meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Kabupaten Mahakam Ulu, upaya lain yang dilakukan berupa penambahan tenaga pengajar. Tenaga pengajar ditambah untuk mendorong peningkatan kualitas sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk mendukung program peningkatan layanan dasar ini, Bupati Mahakam Ulu kemudian menciptakan *best practice* yaitu Program Gerbang Cerdas Mahulu (GCM). Program inisiatif Bupati ini menjadi payung hukum pemberian bantuan langsung kepada pelajar dan masyarakat Mahakam Ulu untuk mengakses pendidikan secara gratis. Dalam hitungan tahun, Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Mahakam Ulu meningkat seiring tersedianya sarana prasarana sekolah, termasuk hadirnya program bantuan langsung berupa perlengkapan sekolah yang diberikan pemerintah. Bahkan, pada tahun 2021, APS tingkat usia SMP Kabupaten Mahakam Ulu mencapai 107,36 persen dan tertinggi se-Kalimantan Timur, sedangkan APS tingkat SD menyentuh angka 98,37 persen.

Untuk menyukseskan program GCM dan secara umum meningkatkan kapasitas SDM Kabupaten Mahakam Ulu, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mengimplementasikan program beasiswa GCM yang diluncurkan tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu telah membantu pendidikan sekitar 1.073 mahasiswa/i asal Mahakam Ulu untuk menimba ilmu di puluhan universitas negeri dan swasta ternama di Indonesia. Pembiayaan ini meliputi Biaya Pendidikan, Uang Saku dan Uang Pondsokan/Kost.

Terdapat tiga jenis beasiswa yang ditawarkan pemerintah melalui Program GCM, yaitu Beasiswa Kerjasama, Beasiswa Khusus, Beasiswa Umum (Stimulan) dan Beasiswa Pertambahan. Klasifikasi ini tentu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Mahakam Ulu. Beasiswa Kerjasama diberikan kepada peserta didik lulusan SMA/SMK setelah dinyatakan lulus tahapan seleksi yang dilaksanakan Dinas Pendidikan bekerjasama dengan universitas yang telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Jenis keilmuan ditetapkan pemerintah bekerjasama dengan universitas terkait. Kemudian, Beasiswa Khusus diberikan kepada peserta didik penyandang disabilitas, dan atau korban dampak sosial dan bencana. Beasiswa ini disesuaikan dengan kesediaan kuota, termasuk keinginan calon mahasiswa. Sementara itu, Beasiswa Umum ini diberikan kepada peserta didik berupa biaya pendidikan setiap tahunnya bagi semua jenis keilmuan dan jenjang pendidikan. Jenis Beasiswa Umum (Stimulan) diantaranya Beasiswa Tugas Akhir, Beasiswa Prestasi, dan Beasiswa Tidak Mampu. Beasiswa ini diberikan untuk semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, mulai dari diploma hingga doktor. Adapun Beasiswa Pertambahan diberikan kepada peserta didik yang sebelumnya telah mendapatkan bantuan pendidikan dari sumber lain yang besarnya dinilai kurang mencukupi.

KESIMPULAN

Sebagai daerah perbatasan, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menjadikan peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan sebagai salah satu program prioritasnya. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berupaya melakukan penataan dan peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata, dan berkeadilan. Dari berbagai program strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, upaya reformasi pendidikan dalam bentuk perhatian terhadap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas SDM menjadi yang paling menonjol. Pembangunan infrastruktur pendidikan telah menysar berbagai jenjang mulai dari PAUD hingga SMP di berbagai kecamatan bahkan desa atau kampung. Bahkan, akselerasi pembangunan infrastruktur pendidikan terus dilakukan dengan berupaya meraih kualitas standar nasional. Dalam konteks peningkatan kapasitas SDM, terdapat satu program yang menunjukkan ciri khas yang dimiliki Kabupaten Mahakam Ulu dalam bentuk program Gerbang Cerdas Mahulu yang didukung dengan program beasiswa GCM. Meskipun memberikan perhatian pada peningkatan kapasitas SDM,

program GCM juga memiliki substansi yang didalamnya berupa pemberian bantuan langsung kepada pelajar dan masyarakat Mahakam Ulu untuk mengakses pendidikan secara gratis.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia 2022-2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Beetham, H., & Sharpe, R. (Eds.). (2013). *Rethinking pedagogy for a digital age: Designing for 21st century learning*. London: Routledge.
- Cheng, Y. C. (2005). Globalization and educational reforms in Hong Kong: Paradigm shift. In J. Zaida, K. Freeman, M. Geo-JaJa, S. Majhanovich, V. Rust, & R. Zajda (Eds.), *The international handbook on globalization and education policy research*.(ch. 11) (pp. 165–187). Dordrecht: Springer.
- Cheng, Y. C., & Townsend, A. C. (2000). Educational change and development in the Asia-Pacific region: Trends and issues. In *Educational change and development in the Asia-Pacific region: Challenges for the future* (pp. 317-343). Swets en Zeitlinger BV.
- Elyta, E., & Kartikasari, W. (2021, January). Strengthening the Border Tourism in Sambas District of West Kalimantan Indonesia in the Covid-19 Pandemic: A Political Boundaries Perspective. In *4th International Conference on Sustainable Innovation 2020–Social, Humanity, and Education (ICoSIHESS 2020)* (pp. 192-202). Atlantis Press.
- Fadhil, I., & Sabc-El-Rayess, A. (2021). Providing equity of access to higher education in Indonesia: A policy evaluation. *Indonesian Journal on Learning and Advanced Education (IJOLAE)*, 3(1), 57-75.
- Figlio, D., & Loeb, S. (2011). School accountability. In E. A. Hanushek, S. Machin, & L. Woessmann (Eds.), *Economics of Education* (Vol. 3, pp. 384–416).
- Gawlik, M. A. (2012). Moving beyond the rhetoric: Charter school reform and accountability. *The Journal of Educational Research*, 105(3), 210–219.
- Jaelani, A. K., Handayani, I. G. A. K. R., & Karjoko, L. (2020). Development of tourism based on geographic indication towards to welfare state. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(3s), 1227-1234.
- Keddie, A. (2015). School autonomy, accountability and collaboration: a critical review. *Journal of Educational Administration and History*, 47(1), 1–17.
- Longworth, N. (2013). *Lifelong learning in action: Transforming education in the 21st century*. London: Routledge.
- Medeiros, E. (2015). Territorial impact assessment and cross-border cooperation. *Regional Studies, Regional Science*, 2(1), 97-115.
- Prasetyo, A., Asmoro, H., Sipahutar, H., Nuryadin, D., & Budi, S. C. W. (2020, May). Human resource productivity development strategy in the regional innovation process. In *1st Borobudur International Symposium on Humanities, Economics and Social Sciences (BIS-HESS 2019)* (pp. 887-892). Atlantis Press.
- Putri, D. S. H., Hernovianty, F. R., & Yuniarti, E. (2020). Analisis Komoditas Unggulan Berbasis Pertanian di Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. *JeLAST: Jurnal Teknik Kelautan, PWK, Sipil, dan Tambang*, 7(2), 1-6.
- Putri, R. F., & Sulistya, A. R. (2019). Determination of Priority Regions as The Direction of Decision-Making for Land Development of West Kalimantan Province. *Journal of Geoscience, Engineering, Environment, and Technology*, 4(3), 186-197.
- Putri, R. Y. (2019). The village governance model that empowers communities in indonesia's border areas. *Journal of Urban Sociology*, 2(1), 16-27.
- Rahim, D. A., Priyarsono, D. S., Rustiadi, E., & Syaikat, Y. (2023). Sustainable Development of Indonesia's Land Border Areas; Overview from an Economic

- Perspective. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 24(1), 172-189.
- Ramirez, F. O., & Chan-Tiberghien, J. (2003). Globalisation and education in Asia. In J. P. Keeves & R. Watanabe (Eds.), *International handbook of educational research in the Asia-Pacific region* (pp. 1095–1106). Dordrecht: Kluwer Academic.
- Siswanto, D. J., Tegor, T., Haqiqi, F., Yusmalina, Y., & Susanto, A. (2022). Human Resources Management in The Country's Border Region Faces Industry 4.0 and The Covid-19 Pandemic. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 228-242.
- Sukmayadi, V., & Yahya, A. H. (2020). Indonesian education landscape and the 21st century challenges. *Journal of Social Studies Education Research*, 11(4), 219-234.
- Uhaib, M., Yuliansyah, M., Elyta, E., & Isdairi, K. A. (2022). Policy for the Development and Education Management of Entikong Border Area on Political Economic Perspective. *Khazanah Sosial*, 4(4), 745-756.
- Zajda, J. (Ed.). (2021). *Third international handbook of globalisation, education and policy research*. Springer International Publishing.